
HEGEMONI TIONGKOK ATAS SUNGAI MEKONG DAN PENGARUHNYA TERHADAP NEGARA DI BAGIAN HILIR: KAMBOJA, LAOS, THAILAND, VIETNAM

Irma Indrayani¹, Zulkarnain², Dinanti Erawati³

^{1,2,3} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional, Jakarta

Email : ¹irma.indrayani@civitas.unas.ac.id,

²zulkarnainunas@civitas.unas.ac.id, ³edinanti@civitas.unas.ac.id

Abstract

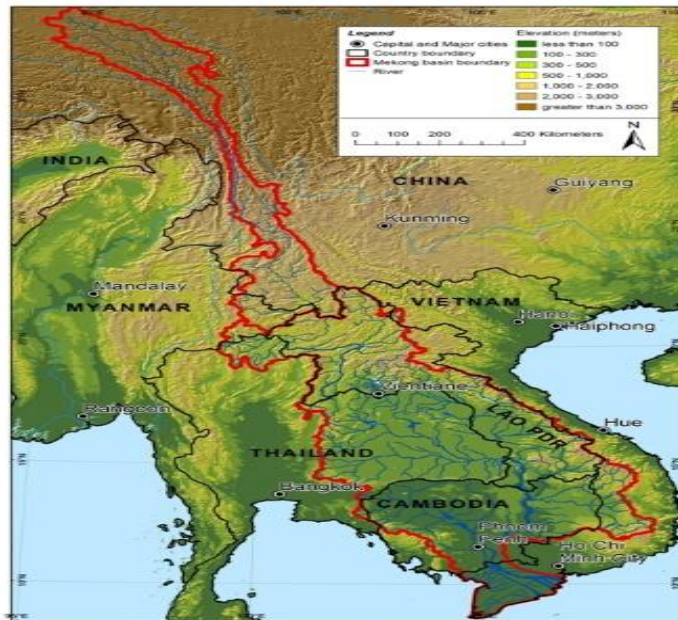
Mekong region is a geopolitical hotspot, reflecting conflict of interests between riparian countries (China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, and Cambodia) which influence forms of complexity, perspectives and perceptions that lead to tension and conflict. Composition of forces within the Mekong refers to geographical positions that determine strategic positions. China as an upstream riparian country has a more dominant bargaining position. In trying to understand phenomenon of China hegemony, qualitative method as an approach is used through literature study. China hegemony reflects in construction of dams, formation of LMC (Lancang-Mekong Cooperation) and rejection of the MRC (Mekong River Commission).

Keywords: *Hegemony, Geopolitics, Mekong Rivers, Transboundary Waters*

PENDAHULUAN

Sungai adalah salah satu sumber daya yang langka dan tidak tergantikan. Beberapa diantaranya melintasi batas-batas politik (negara). Sungai lintas batas (*transboundary river*) menjadi salah satu issue yang penting untuk dibahas karena merupakan wujud dari sumber daya bersama (*sharing resources*) yang dimanfaatkan secara kolektif oleh negara-negara yang dilewatinya. Kebutuhan dan ketergantungan atas sungai sangat besar sementara hukum internasional yang mengaturnya tidak berkembang (Priscolli & Wolf, 2009). Tak dapat dipungkiri, sungai telah menjadi penyebab ketegangan politik dan bahkan konflik.

Di benua Asia terdapat sungai yang mengalir tiga kawasan, mulai dari Asia Selatan (dataran Tibet) ke Asia Timur (Xinjiang, Yunan) hingga Asia Tenggara (Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam dan Thailand). Bagi masyarakat Tiongkok, sungai ini disebut Lancang Jiang, sementara oleh lima negara lainnya yaitu Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam dan Thailand menamakannya dengan sungai Mekong.



Gambar 1. Peta Aliran Sungai Mekong (anon, n.d.)

Mekong adalah sungai terpanjang yang berada di urutan ke-12 di dunia dan merupakan sungai terpanjang ke-7 di Asia (Ritter, 2018). Bagi enam negara (Tiongkok, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja dan Thailand), Mekong adalah jantung kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Mekong dibagi menjadi dua wilayah yaitu bagian hulu (*upper stream*) yaitu Tiongkok dan Myanmar, dan bagian hilir (*down stream*) yang meliputi Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam. Potensi Mekong sangat besar dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara yang dilaluinya.

Bagi Tiongkok, potensi Mekong yang cukup signifikan adalah debit air yang terdapat pada aliran sungai tersebut. Debit air yang dihasilkan rata-rata mencapai 13.000 m³/tahun (Mekong River Basin, 2011). Debit air yang besar, dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air/PLTA (*hydropower*). Aliran Mekong sebagai *hydropower*, menghasilkan daya yang besar, yaitu 23,000 megawatt di kawasan hulu, dan sekitar 30,000 megawatt di kawasan hilirnya.

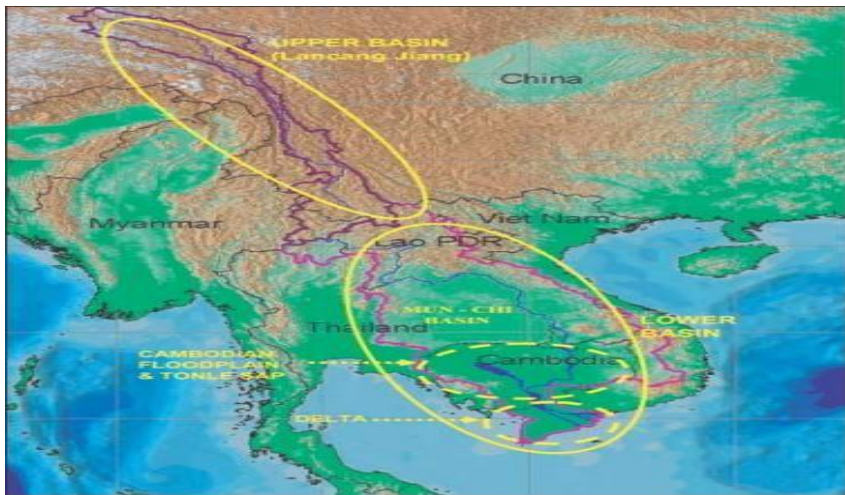
Bagi negara-negara di kawasan hilir Mekong dimanfaatkan sebagai sumber perikanan, irigasi sawah, jalur transportasi dan kekayaan mineral lainnya (Mekong River Commission, n.d.). Pada sektor perikanan misalnya, Mekong memberikan kontribusi besar bagi negara-negara di bagian hilir (Perikanan Mekong, n.d.). Diantaranya pada bidang produksi akuakultur. Di tahun 2008, produksi diperkirakan sekitar 1,9 juta ton, lima kali lebih banyak

dari tahun 2000. Sekitar 1,6 juta berasal dari Delta Mekong di Vietnam. Selain itu produksi perikanan darat di Kamboja, Laos, dan Thailand juga mengalami hal yang serupa, disamping penangkapan perikanan konvensional.

Pada sektor pertanian, padi adalah tanaman terpenting di Asia, dengan penggunaan metode irigasi yang berasal dari aliran sungai. Mekong dapat mengairi lebih dari 10 juta hektar lahan pertanian yang didedikasikan untuk produksi beras khususnya bagi negara-negara bagian hilir (Agriculture in Mekong, n.d.).

Persoalan kemudian muncul ketika setiap negara berupaya memanfaatkan sumber daya Mekong secara maksimal untuk kepentingan nasionalnya. Konflik kepentingan tidak dapat dihindari ketika pemanfaatan sumber daya bersama (*sharing resources*) ini dilakukan oleh tiap-tiap negara. Disatu sisi bagaimanapun negara-negara yang dilewati oleh aliran Mekong memiliki hak untuk memanfaatkan potensinya karena berada wilayah geografisnya. Namun disisi yang lain, negara-negara tersebut tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi potensinya secara berlebihan. (International Rivers, 2013), agar dapat dimanfaatkan bersama secara berkelanjutan (*sustainable*).

Persoalan ini kemudian mendorong negara-negara yang berada di kawasan hilir, bersepakat untuk menjalin kerja sama, dengan membentuk komisi yang bertujuan mengatur agar pemanfaatan tidak dilakukan secara berlebihan. Pada tahun 1995, empat negara hilir membentuk *Mekong River Commission* agar Mekong dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. (Mekong River Commission For Sustainable Development, n.d.)



Gambar 2. Pembagian wilayah hulu dan hilir Mekong (Overview of the Hydrology of the Mekong Basin, 2005)

Meski demikian dalam pembentukan komisi ini, Tiongkok dan Myanmar (sebagai negara di kawasan hulu) menolak untuk ikut serta, dan hanya sebagai rekan dialog saja. Sikap tersebut disebabkan di satu sisi Tiongkok dan Myanmar, sebagai negara yang diuntungkan secara geografis berada di kawasan hulu, tidak akan mendapatkan dampak yang merugikan ketika Mekong dimanfaatkan secara berlebihan. Di sisi yang lain, kerja sama ini justru akan membatasi mereka untuk memanfaatkan potensi Mekong secara maksimal.

Pada faktanya, Tiongkok telah memulai pemanfaatan besar-besaran pada tahun 1990an dengan membangun beberapa bendungan sebagai sumber utama pembangkit listrik untuk sector industri yaitu disepanjang Mekong di kawasan Provinsi Yunan (Understanding the impacts of China's Upper Mekong Dam, 2014). Dari 14 bendungan yang di rencanakan, enam bendungan sudah selesai dibangun, empat bendungan sedang dalam proses pembangunan, tiga bendungan dalam proses persiapan, sementara satu bendungan lainnya sedang dalam tahap perencanaan.

Konsekuensi dari pembangunan bendungan ini, secara langsung mengurangi debit air di kawasan hilir, memblokir rute migrasi ikan di sepanjang Mekong, mengurangi area lahan basah dan mengubah habitat yang diperlukan untuk perikanan Mekong. Pembangunan bendungan ini membuat khawatir negara-negara riparian (negara tepian Mekong) yang berada di bagian hilir Mekong. Karena bagaimanapun aliran Mekong adalah sumber air yang vital bagi pertanian negara-negara di kawasan hilir. Tidak itu saja, dengan berkurangnya debit air, akan mengakibatkan kekeringan di wilayah negara-negara di kawasan hilir yang secara otomatis akan berdampak negatif bagi sektor perikanan dan pertanian.

Tabel 1 Rincian luas daerah aliran Mekong (FAO)

Negara	Luas Wilayah yang Dialiri (Km ²)	Presentase Sungai yang Mengalir (%)	Rata-rata Arus Air (m ³ /dtk)	Sumbangan Arus Air (%)
Wilayah Hulu				
Tiongkok	165	21	2.410	16
Myanmar	24	3	300	2
Wilayah Hilir				
Laos	202	25	5.270	35
Thailand	184	23	2.560	17

Kamboja	155	20	2.860	19
Vietnam	65	8	1.660	11
Total	795	100	15.060	100

Sumber daya alam dalam perspektif geopolitik dan hubungan internasional memiliki kaitan erat karena tiga alasan utama. Pertama, fakta fisik bahwa sumber daya alam tidak terdistribusi secara merata di seluruh dunia. Yang kedua, sumber daya sangat penting untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat diperdagangkan secara internasional. Yang ketiga adalah sifat anarkis dari politik internasional karena tidak adanya pemerintahan global yang otoritatif, hasil politik dan ekonomi internasional cenderung dipengaruhi oleh kekuatan dan aktor internasional dibandingkan dengan lembaga regional dan hukum internasional (Danreuther & Ostrowski, 2013).

Dari beberapa fenomena yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas bagaimana ketergantungan negara-negara riparian terhadap sumber daya Mekong yang ditentukan oleh relasi hulu-hilir yang tidak setara. Ketidaksetaraan hulu-hilir ini kemudian memunculkan persoalan krusial karena menyangkut keberlangsungan hidup suatu negara. Persoalan ini tentu saja berkaitan langsung dengan eksistensi geopolitik pada tiap-tiap negara di kawasan tersebut.

Di satu sisi dalam perspektif politik internasional, ketergantungan terhadap sumber daya Mekong akan berimplikasi pada kemandirian bagi negara-negara riparian, dalam menentukan kekuatan geopolitiknya. Di sisi lain, Tiongkok dengan segala strateginya terhadap ketergantungan akan sumber daya ini, dapat menekan dan menjadikannya sebagai alat pengaruh perluasan geopolitik.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: "Bagaimana praktik hegemoni Tiongkok atas sungai Mekong sebagai upaya perluasan geopolitik serta pengaruhnya terhadap negara-negara di bagian hilir?"

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang dianggap relevan dengan faktor-faktor yang terefleksi dalam hegemoni Tiongkok atas Mekong. Antara lain, teori hegemoni dalam pendekatan realis, teori geopolitik, dan game theory digunakan untuk membedah fenomena hegemoni Tiongkok atas Mekong. Selanjutnya, Teori Depedensi dalam pendekatan neofungsionalisme digunakan untuk menganalisa ketergantungan negara-negara hilir Mekong dan upaya untuk mempertahankan kepentingan mereka atas Mekong.

Teori Hegemoni

Hegemoni dalam perspektif Hubungan Internasional yang dikemukakan oleh Robert Keohane dipahami secara konvensional dalam politik internasional, merujuk pada peran nasional (aktor) dan sistem internasional tertentu (Mowle & Sacko, 2007). Umumnya digambarkan sebagai dominasi atau kepemimpinan. Hegemoni dalam hal dominasi diinterpretasikan secara beragam oleh ilmuwan politik internasional. Ada yang memahaminya sebagai "dominasi satu negara atas rekan-rekannya", atau "dominasi satu negara atas yang lain" (Brem & Stiles, 2008), atau "dominannya kemampuan militer dan ekonomi" (R.W, 1993). Fokus dominasi ini kemudian diletakkan pada sumber daya agregat aktor dalam sistem internasional yang menawarkan berbagai kemampuan, oleh karena itu semuanya tergantung pada tingkat konsentrasi sumber daya tersebut dalam sistem internasional.

Namun demikian pemahaman ini tidak terbatas pada kemampuan aktor saja, melainkan didorong oleh kepentingannya juga. Dengan kata lain kekuatan hegemoni dikonseptualisasikan sebagai aktor yang cukup kuat untuk membangun aturan internasional, kemudian memastikan itu ditaati, serta memiliki kemauan untuk melakukannya. Secara teoritis Robert O. Keohane mendefinisikan Hegemoni adalah, "situasi di mana satu negara cukup kuat untuk mempertahankan aturan penting, yang mengatur hubungan antar negara, dan bersedia melakukannya" (Ikenberry & Kupchan, 1990).

Lebih jauh Keohane mendeskripsikan konsep stabilitas hegemoni, sebagaimana diterapkan pada ekonomi politik dunia. Pada konteks ini, ia mendefinisikan hegemoni sebagai "dominasi atas sumber daya material". Kemudian membaginya menjadi empat set sumber daya yang sangat penting. Menurutnya kekuatan hegemoni harus memiliki kontrol atas empat set sumber daya tersebut, antara lain : *Pertama*, kontrol atas bahan baku, *kedua* kontrol atas sumber modal, *ketiga* kontrol atas pasar, dan *keempat* keunggulan kompetitif dalam produksi barang-barang bernilai tinggi (Keohane, 1984). Pentingnya mengendalikan sumber bahan baku telah memberikan pembenaran tradisional untuk ekspansi teritorial dan imperialisme, serta untuk perluasan pengaruh informal.

Teori Ketergantungan (*Dependensi*)

Perdebatan di antara para reformis liberal (Prebisch), kaum Marxis (Andre Gunder Frank), dan para ahli teori sistem dunia (Wallerstein) tentang teori ketergantungan, cukup sengit dan menantang secara intelektual. Meskipun demikian, ada beberapa proposisi inti yang tampaknya mendasari analisis sebagian besar ahli teori ketergantungan. Ketergantungan dapat dikatakan sebagai penjelasan tentang perkembangan ekonomi suatu negara

dalam hal pengaruh eksternal - politik, ekonomi, dan budaya - pada kebijakan pembangunan nasional (Sunkel, 1969).

Menurut Theotonio Dos Santos yang menekankan dimensi historis dari hubungan ketergantungan, mendefinisikan:

“[Ketergantungan] suatu kondisi historis yang membentuk struktur tertentu dari ekonomi dunia sedemikian rupa sehingga menguntungkan beberapa negara dengan merugikan negara lain dan membatasi kemungkinan pengembangan ekonomi bawahan ... sebuah situasi di mana ekonomi suatu kelompok negara tertentu dikondisikan oleh pengembangan dan perluasan ekonomi lain, yang menjadi sasaran negara mereka sendiri” (Santos, 1971).

Ada tiga fitur umum untuk definisi ini yang dimiliki oleh sebagian besar ahli teori dependensi. Pertama, ketergantungan mencirikan sistem internasional yang terdiri dari dua set negara, yang secara beragam digambarkan sebagai dominan dan tergantung, atau pusat dan pinggiran atau metropolitan dan satelit. Negara-negara dominan adalah negara-negara industri maju dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Negara-negara dependen adalah negara-negara Amerika Latin, Asia, dan Afrika yang memiliki GNP *per kapita* rendah dan yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tunggal untuk pendapatan devisa.

Kedua, kedua definisi tersebut memiliki kesamaan asumsi bahwa kekuatan-kekuatan eksternal sangat penting bagi kegiatan ekonomi di dalam negara-negara dependen. Kekuatan-kekuatan eksternal ini termasuk perusahaan-perusahaan multinasional, pasar komoditas internasional, bantuan asing, komunikasi, dan sarana lain yang dengannya negara-negara industri maju dapat mewakili kepentingan ekonomi mereka di luar negeri.

Ketiga, definisi dependensi semuanya menunjukkan bahwa hubungan antara negara dominan dan dependen adalah dinamis karena interaksi antara dua set negara cenderung tidak hanya memperkuat tetapi juga mengintensifkan pola yang tidak setara. Selain itu, ketergantungan adalah proses sejarah yang sangat mendalam, berakar pada internasionalisasi kapitalisme. Ketergantungan adalah proses yang berkelanjutan:

“Amerika Latin adalah hari ini, dan telah sejak abad keenam belas, bagian dari sistem internasional yang didominasi oleh negara-negara yang sekarang berkembang.... Keterbelakangan Latin adalah hasil dari serangkaian hubungan tertentu dengan sistem internasional.” (Bodenheimer)

Singkatnya, teori ketergantungan mencoba menjelaskan keadaan terbelakang banyak negara di dunia saat ini dengan memeriksa pola-pola interaksi di antara bangsa-bangsa dan dengan menyatakan bahwa ketidaksetaraan di antara bangsa-bangsa adalah bagian intrinsik dari interaksi-interaksi itu.

Sebagian besar teori ketergantungan menganggap kapitalisme internasional sebagai kekuatan pendorong di belakang hubungan ketergantungan. Andre Gunder Frank, salah satu teori dependensi paling awal, cukup jelas dalam hal ini, menurutnya:

... penelitian historis menunjukkan bahwa keterbelakangan kontemporer sebagian besar merupakan produk historis dari hubungan ekonomi dan masa lalu yang berkelanjutan dan yang lainnya antara satelit yang kurang berkembang dan negara-negara metropolitan yang sekarang berkembang. Lebih jauh, hubungan ini adalah bagian penting dari sistem kapitalis pada skala dunia secara keseluruhan. (Frank, 1972).

Teori Geopolitik

Teori geopolitik dan hubungan internasional menjadi bagian integral dari dorongan untuk mengamankan akses ke sumber daya global yang vital. Sejarah mencatat bahwa sumber daya menjadi salah satu hal yang diperjuangkan oleh negara, banyak contoh bagaimana perjuangan untuk mengamankan sumber daya ini telah mendorong politik internasional dan bahkan peperangan.

Saul Bernard Cohen (Cohen, 2015) mendefinisikan geopolitik sebagai pengaturan geografis serta perspektif di satu sisi, dan di sisi lain sebagai proses politik. Pengaturan terdiri dari fitur dan pola geografis dan wilayah berlapis-lapis yang terbentuk. Proses politik termasuk kekuatan yang beroperasi di tingkat internasional dan yang berada di kancah domestik yang mempengaruhi perilaku internasional.

Pengaturan geografis dan proses politik keduanya dinamis, dan masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Geopolitik membahas konsekuensi dari interaksi ini. Pada pengertian ini, geografi didefinisikan dalam istilah spasial sebagai "tempat", sementara politik sebagai "koneksi" dan bagaimana interaksi antara keduanya. "Tempat" adalah pengaturan terbatas di mana interaksi antara manusia dan lingkungan alami terjadi. "Koneksi" mengacu pada sirkulasi orang, barang, dan ide yang mengikat tempat bersama-sama dan berdampak pada mereka.

Game Theory

Konsep kerja sama dalam teori permainan berarti "bertindak bersama, dengan tujuan yang sama". Koalisi dua atau lebih individu untuk bertindak bersama dengan tujuan yang sama, individu harus mengesampingkan fungsi utilitas mereka yang terpisah dan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru -fungsi utilitas kolektif untuk menentukan perilaku kolektif mereka. Namun, dalam game theory bahwa setiap pemain adalah pembuat keputusan yang cerdas dan rasional, yang perilakunya pada akhirnya diturunkan dari tujuan memaksimalkan kepentingannya sendiri (Myerson, 1997).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman yang meneliti fenomena sosial. Dalam metode ini, sebuah fenomena atau objek penelitian diteliti secara kompleks baik melalui rincian kata-kata, rincian laporan maupun pandangan responden oleh peneliti. (Harrison, 2009)

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Metode tersebut dapat dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dengan menggunakan teori yang dianggap cocok untuk menganalisa isu yang sedang diangkat. Isu yang diajukan dianalisa dengan menggunakan teori yang telah dipilih, dan kemudian di jabarkan sehingga jawaban akhir dan hipotesa yang selaras ditemukan. (Zed, 2003)

Pembahasan

Mekong dalam perspektif negara, dipandang sebagai sumber daya yang bukan hanya sebagai modal pertumbuhan ekonomi, namun juga menjadi sumber kekuatan politik. Dalam perspektif hubungan internasional, sumber daya alam adalah salah satu kekuatan negara secara politis karena dapat menekan negara yang lain. Sedangkan secara geopolitik, sumber daya alam adalah salah satu instrument ketahanan nasional suatu negara.

Sumber daya alam adalah hal penting dalam politik internasional. Energi dan mineral sangat penting untuk kehidupan ekonomi modern, memberikan input sekaligus daya pada industri, infrastruktur, dan sistem transportasi. Pengelolaan sumber daya alam yang saling bergantung adalah masalah mendesak bagi banyak negara. Akan tetapi, dengan terkonsentrasinya sumber daya secara geografis artinya hanya sedikit negara yang dapat memenuhi kebutuhannya, sementara sebaliknya di bagian negara lain tidak memilikinya.

Secara teoritis, geopolitik dan hubungan internasional selalu menjadi bagian integral dari dorongan untuk mengamankan akses ke sumber daya global yang vital. Sejarah mencatat bahwa sumber daya menjadi salah satu hal yang diperjuangkan oleh negara, banyak contoh bagaimana perjuangan untuk mengamankan sumber daya ini telah mendorong politik internasional dan bahkan peperangan (Cohen, 2015).

Sumber daya memiliki keterkaitan erat dengan masalah keamanan geopolitik. Saling ketergantungan sumber daya menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara pemilik sumber daya dan negara yang bergantung pada sumber daya, berbagi atas sumber daya yang sama. Permasalahan ini kemudian perlu dicarikan solusinya. Untuk negara-negara pemilik, godaan untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya sebagai alat diplomatik. Ini dapat mengambil bentuk 'negatif' dan 'positif'. Sekuritisasi geopolitik tergantung pada seberapa banyak masalah sumber daya bersinggungan dengan ketidakpastian geopolitik. Untuk beberapa negara produsen, kekayaan sumber daya bukan hanya alat diplomatik yang penting, tetapi dapat digunakan untuk mengkompensasi kelemahan ketika berhadapan dengan ancaman geopolitik. (Wilson, 2007).

Negara-negara di kawasan hilir Mekong yaitu Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam bergantung pada sumber daya Mekong sebagai sumber irigasi untuk pertanian, sektor perikanan dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sementara di kawasan hulu yaitu Tiongkok dan Myanmar, Mekong ditempatkan hanya sebagai sumber utama pembangkit listrik tenaga air. Selaras dengan fenomena ketergantungan negara riparian hilir Mekong, Theotonio Dos Santos mengemukakan teori ketergantungan yang menekankan dimensi historis dari suatu hubungan. (Dann & Hodges, 1971).

Dalam perspektif Dos Santos negara riparian hilir ditempatkan sebagai negara yang tergantung atau pinggiran. Sebaliknya Tiongkok dikategorikan sebagai negara dominan atau pusat. Karena, upaya Tiongkok dalam pengembangan ekonominya terutama berkaitan dengan kebutuhan listrik untuk sector industri melalui pemanfaatan Mekong secara besar-besaran secara otomatis menempatkan Tiongkok sebagai negara pusat atau dominan. Dan sebagai konsekuensinya menempatkan negara bagian hilir pada posisi dependen atau tergantung.

Pada konteks Mekong, Tiongkok sebagai aktor yang memiliki keunggulan utama kekuatan ekonomi maupun keamanan dengan kebijakan politik internasional yang berupaya memegang kendali atas Mekong dan memastikannya dapat dimanfaatkan, tanpa diganggu oleh pihak manapun. Mengingat sumber daya Mekong memiliki arti penting sebagai sumber daya strategis utama.

Sebagai negara yang berada di wilayah sumber (hulu) aliran Mekong, Tiongkok mampu menuai semua manfaat Mekong, walaupun ini berarti akan berhadapan secara diametral dengan empat negara anggota MRC yaitu Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Konstelasi hulu-hilir seperti ini, biasanya akan menghasilkan "*Rambo-Situations*", yang dalam perspektif *Game Theory* ditandai dengan aktor hulu, yang tidak mengandalkan kerja sama demi tercapainya kepentingan. Dalam kasus Mekong, fakta menegaskan bahwa Tiongkok adalah "*Rambo*", tidak hanya secara geografis, tetapi juga secara politik, militer dan ekonomi. (Meniken, 2007).

Tidak mengherankan ketika Tiongkok menolak untuk meratifikasi rancangan PBB tentang "Konvensi Hukum Penggunaan Jalur Air Internasional Non-Navigasi", kemudian menentang 103 negara yang memberikan suara mendukung dan 27 abstain. Perselisihan antara negara-negara hulu dan hilir tercermin dalam debat Pasal 5 dan 7 Konvensi. (Huiping, Rieu-Clarke, & Wouters; Huiping, Rieu-Clarke, & Wouters).

Struktur masalah kerja sama politik di wilayah sungai adalah terdiri dari kombinasi faktor geografis dan sosial-ekonomi, dengan yang pertama adalah hulu-hilir atau situasi bersama, dan yang kedua adalah homogen atau heterogen. Tiongkok cenderung mengecilkan pengaruh pembangunan bendungan di Yunnan, karena hanya sebagian kecil dari total aliran berasal dari Tiongkok. Argumen ini, bagaimanapun, mengabaikan fakta bahwa total aliran diukur dalam delta, sedangkan di ibukota Laos Vientiane sekitar 60 persen dari air Mekong berasal dari Tiongkok. (Osborne, 2000).

Tiongkok sebagai aktor ganda (geopolitik dan sosial ekonomi) atau "*Rambo*" dalam game ini tidak terpengaruh oleh masalah keamanan dan lingkungan yang berasal dari pemanfaatan Mekong, karena ia mampu mengeksport semua dampak negatif. Sejarah yang tidak stabil di daratan Asia Tenggara mungkin tidak kondusif bagi ambisi perdagangan Tiongkok tetapi juga tidak akan dianggap sebagai ancaman nyata.

Sekalipun Tiongkok bergabung dengan MRC, sepertinya tidak akan mengubah perilakunya. Mempertimbangkan politik kekuasaan di wilayah itu, tidak mengherankan bahwa tidak ada negara Mekong "yang merasa mampu menghadapi Tiongkok secara formal" tentang dampak dari pembangunan 17 bendungan. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi Tiongkok yang pesat, sumber daya air semakin langka. Tindakan domestik ditujukan untuk mengatasi masalah yang berasal dari kelangkaan ini dan dari distribusi regional yang tidak merata menghasilkan efek internasional. Kinerja Tiongkok dalam negosiasi internasional dan juga di wilayah regional Mekong hanya kerja sama lintas batas lebih merupakan opsi strategis daripada komitmen normatif.

Kesinambungan konseptual dalam kebijakan luar negeri Tiongkok terdiri atas pemeliharaan dua prinsip dasar "otonomi" dan "keamanan". Dalam imperatif kebijakan luar negeri Tiongkok ini, tingkah lakunya dalam pengelolaan sumber daya lintas batas dapat dipahami. Analisis yang kurang memiliki pemahaman ini mengarah pada harapan yang tidak realistis bahwa Tiongkok mungkin berubah menjadi hegemoni yang baik hati. Pentingnya asumsi semacam itu dalam politik sumber daya semakin memperumit struktur masalah yang sudah sangat asimetris karena potensi "Rambo" geofisika dan sosio-ekonomi Tiongkok. (Meniken, 2007).

Berkaitan dengan sumber daya air, Tiongkok merupakan investor *hydropower* terbesar di Asia sejak munculnya inisiasi "going out strategy" pada tahun 1999. Sebagai *new emerging country*, energi listrik sangat dibutuhkan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Selain itu, *hydropower* dijadikan alternatif bagi Tiongkok untuk mengakali penurunan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan polusi yang berlebihan. (Zhang, n.d.) Tiongkok memanfaatkan potensi debit air Mekong sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Hal tersebut sesuai dengan rancangan pembangunan energi skala 10 tahun oleh Tiongkok. Tiongkok ke depannya mengandalkan PLTA sebagai salah satu sumber energi yang ramah lingkungan. Provinsi Yunnan berperan sebagai lima pilar tonggak kekuatan ekonomi Tiongkok. (Zhenming, 2011).



Source: MRC Strategic Environmental Assessment: ICEN, 2010
*Initially proposed as a 3,300 MW project. 465 MW and 2,600 MW options have also been studied.

Gambar 3. Peta Pembangunan Bendungan di Aliran Mekong (Mekong Mainstream Dam Maps, n.d.)

Kekuatan Tiongkok sebagai negara riparian hulu dalam mendominasi sumber daya regional (Mekong) menempatkan posisinya berhadapan dengan negara-negara riparian hilir. Namun demikian, dalam pandangan realis ketika sebuah kepentingan dilaksanakan yang berdampak pada negara tetangga, biasanya dilakukan oleh kekuatan regional, terlepas dari posisi geografisnya. Disamping langkah-langkah yang lebih konvensional dari kekuatan militer, politik, dan ekonomi.

Secara teoritis, praktik hegemoni Tiongkok terefleksi pada dominasi atas sumber daya Mekong yang dalam pandangan Keohane adalah “dominasi atas sumber daya material”. Dominasi Tiongkok ini lebih spesifik dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek. Seperti yang dikemukakan Keohane yaitu kontrol Tiongkok atas bahan baku, dalam hal ini pengaturan aliran Mekong melalui pembangunan bendungan sebagai sumber *hydropower*.

Kemudian pandangan Keohane tentang kontrol Tiongkok atas sumber modal, yaitu bantuan modal pada negara-negara yang tergabung dalam *Lancang-Mekong Cooperation* yang dibentuknya. Selanjutnya masih dalam pandangan Keohane, kontrol Tiongkok atas pasar, yang tercermin pada investasi perusahaan milik Tiongkok pada pembangunan *hydropower* di negara riparian hilir yang memberikan keleluasaannya dalam menentukan pasar.

Di sini jelas sejalan dengan yang dikemukakan Robert Keohane, Tiongkok melalui kontrolnya atas Mekong telah mempraktikkan konsep hegemoni atas penguasaan sumber daya material. Menurut Keohane, hegemoni adalah, ‘situasi di mana satu negara cukup kuat untuk mempertahankan aturan penting, yang mengatur hubungan antar negara, dan bersedia melakukannya’. (Keohane, 1984).

Berbeda dengan yang dilakukan negara-negara riparian bagian hilir, yang berinisiatif membentuk *Mekong River Commission*, Tiongkok membentuk sebuah badan kerja sama yang dinamakan *Lancang-Mekong Cooperation* bertujuan untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara riparian, meningkatkan kesejahteraan, mempersempit kesenjangan pembangunan, dan mendukung pembangunan Komunitas ASEAN serta mempromosikan implementasi Agenda PBB.

Sebagai pencetus pembentukan kerja sama LMC, Tiongkok menjadi inisiator sekaligus ketua dari kerja sama tersebut. Sebagai ketua kerja sama sub-regional Mekong, Tiongkok bersedia untuk menjadi pendonor keuangan dalam kerja sama. Respon positif yang datang dari seluruh negara-negara riparian Mekong, menjadikan semangat untuk LMC mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas mengenai keberlanjutan dari kerja sama tersebut. (Lancang – Mekong Cooperation: MRC welcomes the New Initiative for Regional Cooperation by six countries in the Mekong River Basin, n.d.).

Dalam politik internasional, inisiatif atau gerakan apapun tidak dapat dilihat secara linear. Argumentasi-argumentasi normative yang tampak di permukaan perlu dikaji lebih dalam agar dapat dilihat kepentingan yang tersembunyi di bawah permukaannya. Lebih jauh apabila ditelusuri, pendirian LMC pada praktiknya cenderung mengakomodasi kepentingan Tiongkok saja. Seperti setelah LMC berdiri, Tiongkok melalui beberapa perusahaannya menawarkan investasi untuk pembangunan bendungan di Mekong bagian hilir, yaitu di Laos, Vietnam, Thailand dan Kamboja.

Melalui LMC, tawaran dari Perusahaan Listrik dan Air Internasional Tiongkok, Hydro Lancang dan Sinohydro, secara jelas menegaskan upaya aktif Tiongkok dalam pembangunan puluhan bendungan di bagian hilir termasuk bendungan Lower Sesan 2 (400 MW) yang diumumkan di Kamboja.

Secara otomatis bendungan-bendungan ini memberikan peluang bagi Tiongkok untuk mengeksplor keahlian, meningkatkan pengaruh politiknya, mengembangkan hubungan dagang, dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Untuk negara tuan rumah, proyek-proyek ini menawarkan suntikan keuangan besar ke ekonomi nasional mereka, sementara juga menyediakan infrastruktur dan listrik. Karenanya, bendungan ini dibingkai sebagai proyek 'win-win' oleh pengembang Tiongkok.

Inisiatif ini sebenarnya adalah bukti nyata, bagaimana Tiongkok dengan strategi investasi ke negara-negara riparian hilir secara eksplisit menjalankan praktik hegemoninya melalui LMC. Sejalan dengan pengertian ini, Tiongkok dengan skenario hegemoni tersebut membuat aturan-aturan yang dirumuskan secara sepihak (sebagai inisiator) yang mau tidak mau harus disepakati oleh negara-negara anggota LMC. Sebagai gantinya, Tiongkok memberikan bantuan yang tidak hanya terbatas pada dukungan keuangan semata, namun juga memberikan bantuan teknis (teknologi).

Dengan demikian, disadari ataupun tidak, Tiongkok telah menciptakan ketergantungan bagi negara-negara riparian hilir. Menurut Theotonio Dos Santos, kondisi ketergantungan ini, dalam bentuk skema bantuan keuangan maupun teknologi, Tiongkok telah membentuk struktur tertentu dari ekonomi sedemikian rupa sehingga menguntungkan negaranya dan merugikan negara lain (negara riparian hilir) dan membatasi kemungkinan pengembangan ekonomi yang bersumber dari potensi Mekong pada negara-negara tersebut.

SIMPULAN

Wilayah Mekong adalah hotspot geopolitik, merefleksikan kepentingan yang saling bertentangan di antara negara-negara riparian

(Tiongkok, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja). Kondisi ini tercermin pada kepentingan masing-masing negara yang sangat mempengaruhi bentuk kompleksitas, cara pandang dan persepsi, hingga kemudian dapat mengakibatkan ketegangan bahkan konflik.

Dalam kasus Mekong, pada dasarnya, hubungan kekuasaan adalah relatif, tergantung pada posisi geografis, kekuatan politik, ekonomi dan diplomasi. Hal ini berimplikasi pada bagaimana suatu konflik atau perdamaian akan diwujudkan. Kekuatan Tiongkok yang merupakan riparian hulu berada dalam posisi yang lebih diuntungkan untuk mengimplementasikan kepentingannya. Dimana kemudian, kepentingan ini, pada gilirannya, dapat menjadi pemicu konflik regional.

Komposisi kekuatan di dalam Mekong didefinisikan terutama oleh posisi geografis yang kemudian akan menempatkannya pada posisi strategis. Posisi Tiongkok sebagai negara di bagian hulu memiliki kekuatan tawar (*bargaining position*) yang lebih besar, disamping kekuatan lain yang dimilikinya dalam bidang politik, militer, dan ekonomi. (Ratner, 2003)

Pembangunan bendungan secara besar-besaran, menegaskan upaya Tiongkok dalam mendominasi sumber daya Mekong tanpa menghiraukan kepentingan negara-negara riparian hilir. Di sisi yang lain, pembentukan Lancang-Mekong Cooperation (LMC) sebagai antitesa dari Mekong River Commission (MRC), penolakan atas ratifikasi konvensi PBB tentang pengaturan jalur air non-navigasi serta penarikan diri atas partisipasi dalam Komisi Bendungan Dunia, merefleksikan sikap Tiongkok dalam mengamankan kepentingan nasionalnya sekaligus dominasi (hegemoni) atas Mekong.

Secara etis, pemanfaatan Mekong seharusnya dilihat sebagai *sharing resources* atau sumber daya bersama. Karena pada dasarnya, Mekong secara alamiah telah ada, jauh sebelum batas-batas negara atau politik lahir. Keberadaannya tidak dapat diklaim oleh salah satu pihak sebagai hasil kreasi atau buatanya. Dengan demikian, pemanfaatan Mekong sudah selayaknya dibangun atas pemanfaatan yang berkeadilan, yang tidak hanya menguntungkan satu pihak melainkan harus dapat mendistribusikan kesejahteraan guna keberlangsungan hidup negara-negara riparian secara lebih merata dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

(n.d.). Retrieved from Mekong River Commission:
<https://www.mrcmekong.org/about/mekong-basin/natural-resources/>

- (n.d.). Retrieved from Perikanan Mekong: <http://www.mrcmekong.org/topics/fisheries/>
- (n.d.). Retrieved from Agriculture in Mekong: <https://www.mrcmekong.org/our-work/topics/agriculture-and-irrigation/>
- (n.d.). Retrieved from Mekong River Commission For Sustainable Development: <https://www.mrcmekong.org/about/>
- (2011). Retrieved from Mekong River Basin: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/mekong/mekong-CP_eng.pdf
- Bodenheimer, S. (n.d.). Ketergantungan dan Imperialisme: Akar Keterbelakangan Amerika Latin. In Fann, & Hodges.
- Brem, S., & Stiles, K. (2008). *Cooperating Without America: Theories and Case Studies of Non-Hegemonic Regimes*. London: Routledge.
- Cohen, S. B. (2015). *Geopolitic: the Geography of Internasional Relation*. Rowman & Littlefield.
- Dann, K., & Hodges, D. C. (1971). Bacaan dalam Imperialisme Amerika Serikat. In T. D. Santos, *The Structure of Dependence* (p. 226). Boston: Porter Sargent.
- Danreuther, R., & Ostrowski, W. (2013). *Geopolitics and International Relations of Resources*. Palgrave Macmillan.
- Frank, A. G. (1972). Pengembangan Keterbelakangan. In J. D. Crockcroft, A. G. Frank, & D. Johnson, *Ketergantungan dan Keterbelakangan* (p. 3). New York: Anchor Books.
- Harrison, L. (2009). *Political Research: an Introduction*. (T. Wibowo, Trans.) Routledge.
- Huiping, C., Rieu-Clarke, A., & Wouters, P. (n.d.). Exploring China's transboundary water treaty practice through the prism of UN Watercourse. *Water Internasional*. doi:10.1080/02508060.2013.782134

- Ikenberry, G., & Kupchan, C. (1990). Socialization and Hegemonic Power. *Journal International Organization*, 283-315. doi:10.1017/S002081830003530X
- International Rivers*. (2013, August). Retrieved from The lower Mekong Dams: A Transboundary Water Crisis.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation And Discord In The World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Lancang – Mekong Cooperation: MRC welcomes the New Initiative for Regional Cooperation by six countries in the Mekong River Basin*. (n.d.). Retrieved from Mekong River Commission: <https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/lancang-mekong-cooperation-mrc-welcomes-the-new-initiative-for-regional-cooperation-by-six-countries-in-the-mekong-river-basin/>
- Meniken, T. (2007). China's Performance in International Resource Politics. *Journal Contemporary Southeast Asia*, 29, 101. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/25798816>
- Mowle, T. S., & Sacko, D. H. (2007). *The Unipolar World An Unbalanced Future*. Palgrave Macmillan.
- Myerson, R. B. (1997). *GAME THEORY: Analysis of Conflict*. Massachusetts London: HARVARD UNIVERSITY PRESS Cambridge.
- Osborne, M. (2000). *The Mekong: Turbulent Past, Uncertain Future*. New York: Grove Press.
- Priscolli, J. D., & Wolf, A. T. (2009). *Managing and Transforming Water Conflicts*. England: Cambridge University.
- R.W, C. (1993). *Gramsci: Hegemony and International Relations: An Essay in Method*. Cambridge University Press.
- Ratner, B. (2003). *The politics of regional governance in the Mekong river basin*. University of Minnesota.

- Ritter, M. (2018, January 14). Retrieved from Voice of America: <https://learningenglish.voanews.com/a/china-led-group-wants-more-development-on-mekong-river/4205103.html>
- Santos, T. D. (1971). The Structure of Dependence. In K. Fann, & D. C. Hodges, *US Imperialisme* (p. 226). Boston: Porter Sargent.
- Sunkel, O. (1969). Kebijakan Pembangunan Nasional dan Ketergantungan Eksternal di Amerika Latin. *Jurnal Studi Pembangunan*, 6(1), 23.
- Understanding the impacts of China's Upper Mekong Dam. (2014). *World Rivers Review*, 15.
- Wilson, J. D. (2007). *Natural Resources in International Politics*. Edward Elgar Publishing.
- Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zhang, Y. (n.d.). *Sustainability MDPI*. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/d5a2/e878617732e5fc493572816b39af1dc69fbe.pdf>
- Zhenming, Z. (2011). *Yunnan's Industrial Development Policy and Intermediate Goods Trade with MRBC's in Intermediate Goods Trade in Asia: Economic Deepening Through FTAs/EPAs*. Bangkok: Bangkok Research Center. Retrieved from http://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Brc/pdf/05_chapter11.pdf